



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
UNIT KERJA : KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DENPASAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAULUS DWI LAKSONO HARJONO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 651253

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 485 m2/70 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA, WARISAN Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 69 m2/120 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 385 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, HONDA SEDAN MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 34.300.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 120.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.304.300.000

**III. HUTANG**

Rp. 260.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.044.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.